

Target Sentra Kedelai Nasional, Petani Kab. Serang Dilatih Khusus

SERANG (IM)- Pemkab Serang sudah melakukan persiapan untuk menjadi wilayah sentra pembenihan kedelai. Salah satunya dengan melatih 50 petani untuk mengimplementasikan varietas mikroba. Kabupaten Serang sebelumnya diminta untuk menjadi sentra pembenihan kedelai oleh Menteri Pertanian, RI Syahrul Yasin Limpo melalui pengembangan varietas mikroba. Namun, varietas itu harus diujicobakan terlebih dahulu.

Pakar pertanian sekaligus penemu varietas mikroba, Profesor Ali Zum Mashar mengatakan, 50 orang yang dilatih ini akan menjadi pionir bagi petani-petani lainnya di kecamatan masing-masing. Ia mengatakan, varietas mikroba ini merupakan teknologi yang dapat menghasilkan produktivitas kedelai yang tinggi. Varietas ini lebih berkualitas dari kedelai impor. "Kedelainya besar-besar, kandungan gizinya juga cukup tinggi, kemudian juga dapat mengatasi stunting dan mensejahterakan para petani," ujarnya.

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, pelatihan ini sebagai langkah untuk menyambungkan Kabupaten Serang menjadi sentra pembenihan kedelai. "Kabupaten Serang oleh Kementerian RI diberi mandat sebagai sentra pembenihan kedelai," katanya.

Pihaknya akan melakukan uji coba varietas tersebut di lahan seluas 500 hektare. "Sekarang sedang disiapkan bibit untuk 500 hektare," ujarnya. Pihaknya juga akan memberikan stimulan supaya para petani tidak terbebani untuk melakukan uji coba varietas tersebut. "Tahun depan sudah bisa diujicoba, anggarannya sudah kita masukkan ke TAPD," ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhanah mengatakan, varietas mikroba akan diuji terlebih dahulu oleh Direktorat Perbenihan, Kementerian RI. Sehingga dapat dijadikan varietas lokal dan dapat dikembangkan. Ia menargetkan sertifikasi dari Kementerian akan keluar pada Maret 2023. Sehingga pada Mei hingga Agustus 2023 varietas tersebut dapat digunakan. "Untuk lahannya dan petaninya sudah siap," katanya. ● pra

Cuma Pake KTP Bisa Berobat Gratis di Kab. Tangerang, Begini Caranya

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kabupaten Tangerang mulai mengimplementasikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), setelah sebelumnya mendapat predikat Universal Health Coverage (UHC) per 1 November 2022. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tangerang, Sudyanti mengatakan, program JKN UHC atau cakupan kesehatan semesta dengan sistem Non Cut Off, sudah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. "Saya harap program yang diterapkan di Kabupaten Tangerang ini bisa menjangkau seluruh masyarakat," kata Sudyanti, Kamis (3/11).

Cara kerja sistemnya ialah, masyarakat tidak mampu di Kabupaten Tangerang akan didaftarkan melalui Dinas Kesehatan, setelah kepesertaannya aktif, maka jaminan pelayanan kesehatannya bisa langsung diperoleh.

Kemudian, bagi masyarakat yang kepesertaannya tidak aktif ataupun belum terdaftar sebagai penerima program JKN, maka pada saat masyarakat berada di layanan Faskes dapat diarahkan menggunakan sistem UHC Non Cut Off. Kehadiran program UHC Non Cut Off ini diharapkan berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terbebani biaya kesehatan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, Azis Gunawan menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mengalokasikan APBD sebesar 20 persen untuk program JKN UHC, dengan segmen aktivasi peserta Pemenuhan Bantuan (PBI) APBD mencapai 96 persen.

Untuk mendapatkan akses jaminan secara gratis tanpa biaya, masyarakat Kabupaten Tangerang cukup menggunakan KTP Surat Rujukan Faskes. Adapun bagi masyarakat yang ingin melakukan reaktivasi kepesertaan JKN, dapat datang ke Dinas Kabupaten Tangerang dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan seperti:

1. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
2. Membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa atau Kelurahan.
3. Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit.
4. Surat Keterangan Kontrol oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) apabila pasien rawat jalan.

Selanjutnya, Dinas akan mengecek kelayakan. Apabila lolos kelayakan, selanjutnya akan diberikan surat rekomendasi yang akan ditunjukkan kepada Dinkes. Lalu Dinkes akan mengeluarkan surat untuk dapat dipergunakan oleh peserta dalam pelayanan di Puskesmas ataupun di rumah sakit. ● pp



PROYEK JALAN TOL BOCIMI

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi di Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (3/11). Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan uji coba Jalan Tol Bocimi Seksi Cigombong-Cibadak akan dilaksanakan pada momen Libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

1,3 Juta Keluarga Berisiko Stunting, Pj Gubernur Banten Terjunkan 20 Instansi

Penanganan stunting di Banten akan dilakukan secara berjenjang bersama pemerintah daerah hingga ke tingkat RT. Sehingga hasilnya nanti dapat terukur, kata Pj Gubernur Banten, Al Muktabar.

SERANG (IM)- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Banten, menyebut ada sebanyak 1,3 juta keluarga di Banten berisiko stunting. Adapun angka prevalensi

stunting di Provinsi Banten pada tahun 2021, terdapat 24,5 persen dari data jumlah balita. Sedangkan untuk angka prevalensi stunting per-kabupaten dan kota, yang tertinggi yakni di Kabupaten Pande-

glang dengan 37,8 persen, Lebak 27,3 persen, Kabupaten Serang 27,2 persen. Selanjutnya di Kota Serang 23,4 persen, Kabupaten Tangerang 23,3 persen, Kota Cilegon 20,6 persen, Kota Tangsel 19,9 persen, dan Kota Tangerang 15,3 persen. Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, ada 20 instansi yang diterjunkan dalam rangka menangani stunting dan gizi buruk. Instansi itu bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, mulai dari pemberian

gizi, edukasi, hingga memastikan lingkungannya bersih. Sebab menurut Al, penanganan stunting tidak dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan saja, perlu didekati secara komprehensif. "Stunting itu harus didekati komprehensif. OPD pada dasarnya agenda kerja mereka dapat terakses tangani gizi buruk dan stunting, sampai toilet, bansos. Ada 20 OPD yang relevan dengan penanganan," katanya, Kamis (3/11). Ia menyebutkan, pemerintah bekerja terukur sesuai dengan kelembagaan. Bahkan tim terpadu sudah dibentuk demi menekan kasus stunting. "Secara kelembagaan daerah bekerja terukur dengan arah kebijakan dan penanganan stunting," ungkapnya. Ia menerangkan, penanganan stunting di Banten akan dilakukan secara berjenjang bersama pemerintah daerah hingga ke tingkat RT. Sehingga hasilnya nanti dapat terukur. "Berjenjang ke kabupaten kota, desa, rumah tangga. Ini secara kelembagaan kita, terangnya. ● pra

Masyarakat Tangsel Bisa Menikmati Alun-alun Pamulang Tahun Depan

PAMULANG (IM)- Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) membangun fasilitas publik anyar, yakni Alun-alun Pamulang di Jalan Siliwangi, tepatnya di kawasan Kantor Kecamatan Pamulang. Proses pembangunannya tinggal sekitar 40 persen dan akan dirampungkan pada Desember 2022. "Progress-nya sudah di atas 60 persen, target Desember akhir (2022) sudah selesai," kata Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, Kamis (3/11).

Pilar menjelaskan, pembangunan Alun-alun Pamulang dilakukan di lahan kosong yang dianggap perlu untuk digarap dan dimanfaatkan. Pembangunan sarana dan prasarana atau fasilitas untuk aktivitas atau kegiatan di Alun-alun tersebut diketahui berkapasitas sekitar 70 persen, sementara 30 persennya yakni penghijauan. "Jadi kita bagaimana alun-alun ini yang tadinya lapangan kosong, lapangan buat upacara, masyarakat datang ke sini sungkan karena dipagar, masuk ke sini takut ditegur atau dimarahin. Kita buka, ini adalah milik masyarakat Pamulang, milik masyarakat Tangsel," ujar dia.

Alun-alun tersebut didesain untuk menjadi fasilitas publik dengan beragam kegiatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Akan

ada sejumlah fasilitas yang disediakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hiburan masyarakat terhadap ruang terbuka hijau. "Ini (Alun-alun Pamulang) adalah meeting point, menjadi tempat berkumpul. Orang berkumpul di sini, para orang tua mengawasi anaknya, kita kasih wahana, ada paviliun dan taman bermain anak," kata dia.

Alun-alun Pamulang juga diklaim ramah kalangan disabilitas. Pilar menyebut akan disediakan fasilitas seperti ram untuk kalangan disabilitas yang membutuhkan kursi roda. Tersedia pula toilet khusus bagi kalangan tersebut.

Pilar melanjutkan, Alun-alun Pamulang yang diketahui memakan anggaran sebanyak Rp 9 miliar itu juga bernilai strategis. Pasalnya, lokasinya yang dekat dengan Kantor Kecamatan Pamulang dan Masjid Agung Pamulang juga semakin mempermudah pelayanan terhadap masyarakat. "Kita buat masyarakat nyaman menggunakan fasilitas yang ada di sini karena kita kan juga sangat sulit mencari lahan kosong di Pamulang. Ada lahan kosong seluas ini ya kita manfaatkan, kita berikan untuk masyarakat supaya bisa dimanfaatkan, mudah-mudahan masyarakat bisa senang menikmati public space ini," ujar dia. ● yan

BNK Gandeng Kades se-Kab. Tangerang untuk Cegah Penyalagunaan Narkotika

TANGERANG (IM)- Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Tangerang menggandeng kades se-Kabupaten Tangerang untuk turut serta dalam mengawasi dan mencegah terjadinya penyalagunaan narkotika di wilayah tersebut. Kepala Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Tangerang, Dedi Sutardi mengatakan, acara sosialisasi bahaya narkoba kepada para kades di Kabupaten Tangerang, merupakan salah satu program BNK yaitu masyarakat bersinar.

Jadi tujuannya adalah mensosialisasikan bahaya narkoba kepada masyarakat, namun karena Kabupaten Tangerang memiliki wilayah yang luas, dan penduduk yang cukup padat, maka, program tersebut diwakilkan oleh jajaran perangkat desa serta RT/RW. Karena yang paling dekat dengan masyarakat adalah desa.

"Jadi kalau ke masyarakat satu-satu tidak cukup kuat karena terlalu luas. Maka dari itu melalui desa, dari desa turun ke RT/RW. Karena mereka yang dekat dengan masyarakat, ditambah, ketika ada warga yang tertangkap karena narkoba, pasti selalu mengadu kepada desa," katanya, Kamis (3/11).

Lanjut Dedi, acara sosialisasi ini dilakukan secara tiga

tahap, karena desa di Kabupaten Tangerang cukup banyak, yaitu 246 desa. Menurut dia, para kepala desa dan RT/RW diminta untuk berperan aktif mengawasi peredaran narkoba di wilayahnya masing-masing. Dia juga meminta para kades untuk mengawasi toko-toko kosmetik yang menjual obat-obatan keras secara bebas.

"Kami juga berharap, para kades menganggarkan untuk pengawasan dan pencegahan penyalagunaan narkoba di tiap desa. Karena, pengawasan dan pencegahan bisa terlaksana secara efektif apabila ada fasilitas dan tenaga yang memadai," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Tangerang, Satria Eka Putra menambahkan, langkah yang dilakukan oleh BNK sangat baik.

Karena, untuk menciptakan wilayah yang bebas dari narkoba salah satunya dengan cara memberikan pemahaman terkait bahaya narkoba, dan jenis-jenis narkoba yang ada. "Kami sangat mengapresiasi langkah BNK dalam mensosialisasikan bahaya narkoba, ke tingkat desa dan kelurahan. Hal itu sangat baik untuk menekan peredaran narkoba di daerah-daerah," pungkasnya. ● pp

DIULTIMATUM BIMA ARYA

Pengelola Sepeda Listrik Relokasi Penempatan Armada

BOGOR (IM)- Pengelola sepeda listrik, PT Beam, angkat bicara usai dikeluhkan warga akibat armadanya diparkir sembarangan di jalur pedestrian Sistem Satu Arah (SSA) Kota Bogor. PT Beam berencana untuk merelokasi penempatan armada agar pengguna dan pejalan kaki tetap nyaman.

Country Representative PT Beam Indonesia, Ady Muzadi, menyebutkan penempatan baru armada akan ditentukan di 100 lokasi yang tidak menghalangi jalan trotoar maupun jalan setapak yang bisa digunakan oleh masyarakat.

Ady menjelaskan, relokasi penempatan armada ini akan dilakukan beberapa hari mendatang. Selain relokasi, PT Beam juga akan menambah jumlah petugas untuk memastikan sepeda dan skuter listrik diparkir di tempat yang telah ditentukan.

"Beam akan meluncurkan panduan parkir baru yang dapat diakses melalui aplikasi Beam. Para petugas juga nantinya akan menanggapi masukan dari masyarakat apabila menemukan armada yang diparkir di tempat yang menghalangi jalan umum ataupun di lokasi yang dapat menimbulkan bahaya," ujar dia.

Ady menjelaskan, relokasi penempatan armada ini akan dilakukan beberapa hari mendatang. Selain relokasi, PT Beam juga akan menambah jumlah petugas untuk memastikan sepeda dan skuter listrik diparkir di tempat yang telah ditentukan.

"Beam akan meluncurkan panduan parkir baru yang dapat diakses melalui aplikasi Beam. Para petugas juga nantinya akan menanggapi masukan dari masyarakat apabila menemukan armada yang diparkir di tempat yang menghalangi jalan umum ataupun di lokasi yang dapat menimbulkan bahaya," ujar dia.

Lebih lanjut, Ady menjelaskan, panduan parkir baru ini akan ditampilkannya di jalur pedestrian Sistem Satu Arah (SSA) Kota Bogor. PT Beam berencana untuk merelokasi penempatan armada agar pengguna dan pejalan kaki tetap nyaman.

Country Representative PT Beam Indonesia, Ady Muzadi, menyebutkan penempatan baru armada akan ditentukan di 100 lokasi yang tidak menghalangi jalan trotoar maupun jalan setapak yang bisa digunakan oleh masyarakat.

Ady menjelaskan, relokasi penempatan armada ini akan dilakukan beberapa hari mendatang. Selain relokasi, PT Beam juga akan menambah jumlah petugas untuk memastikan sepeda dan skuter listrik diparkir di tempat yang telah ditentukan.

"Beam akan meluncurkan panduan parkir baru yang dapat diakses melalui aplikasi Beam. Para petugas juga nantinya akan menanggapi masukan dari masyarakat apabila menemukan armada yang diparkir di tempat yang menghalangi jalan umum ataupun di lokasi yang dapat menimbulkan bahaya," ujar dia.

Ady menjelaskan, relokasi penempatan armada ini akan dilakukan beberapa hari mendatang. Selain relokasi, PT Beam juga akan menambah jumlah petugas untuk memastikan sepeda dan skuter listrik diparkir di tempat yang telah ditentukan.

"Beam akan meluncurkan panduan parkir baru yang dapat diakses melalui aplikasi Beam. Para petugas juga nantinya akan menanggapi masukan dari masyarakat apabila menemukan armada yang diparkir di tempat yang menghalangi jalan umum ataupun di lokasi yang dapat menimbulkan bahaya," ujar dia.

Untuk itu, pihaknya selaku pengelola skuter listrik mengapresiasi masukan dari masyarakat yang sudah membantu Beam meningkatkan layanan mikromobilitas dan menghadirkan dampak positif bagi pengguna baru ataupun masyarakat yang sudah sering menggunakan armada kami.

"Kami telah merespon masukan dari masyarakat dengan cepat dan berterima kasih kepada wali kota atas bantuannya dalam menentukan lokasi parkir armada Beam yang baru," ujar dia.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengultimatum PT Beam terkait penempatan sepeda dan skuter listrik yang mengganggu jalur pedestrian. Ia memberikan waktu kepada PT Beam selama satu hingga dua pekan ke depan, untuk merapikan penempatan armadanya. "Kalau tidak, izinnya saya cabut," tegasnya belum lama ini. ● pra



SPKLU PLN DI JAWA BARAT

Pegawai PLN menunjukkan alat pengisian ulang daya untuk baterai mobil listrik di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), PLN UP3 Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/11). PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Distribusi Jawa Barat (UID Jabar) meluncurkan sebanyak 104 SPKLU yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat sebagai upaya menunjang kebutuhan kendaraan bermotor listrik yang saat ini telah mulai massif dikembangkan.



PASAR MURAH DI BANDAR LAMPUNG

Warga antre membeli minyak goreng saat digelar pasar murah di halaman Sekolah SMK Palapa, Bandar Lampung, Lampung, Kamis (3/11). Pasar murah yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandar Lampung diikuti oleh sejumlah distributor sembako bertujuan untuk menjaga kestabilan dan keterjangkauan harga serta ketersediaan pasokan bahan pangan bagi masyarakat Bandar Lampung.

MUI Soroti Makam Ki Buyut Jenggot yang Terancam Direlokasi Pengembang

TANGERANG (IM)- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang menyoroti gelombang terkait makam Ki Buyut Jenggot berada di Kampung Sukasari, Kelurahan Panunggang Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang yang terancam direlokasi oleh pengembang untuk proyek perumahan.

Ketua MUI Kota Tangerang, Baijuri Khoibul Menaila, pemindahan makam siapa pun orangnya, kalau tidak ada urgensinya itu tidak diperbolehkan.

"Walaupun dari awal saya sampaikan ke teman teman bahwa, sesungguhnya ada hukum dasar bahwa yang namanya kuburan siapapun, memindahkan kuburan itu hukumnya tidak boleh tanpa alasan yang diterima," ujarnya Kamis (3/11).

Dirinya menjelaskan, sebuah kuburan boleh dipindahkan ketika ada kepentingan umum. Itu pun harus melalui proses tabayun oleh semua pihak. Namun, adapula hukum yang membolehkan pemindahan makam. Tetapi itu harus memenuhi beberapa aspek. "Ada kemudian hukum itu membolehkan suatu kuburan itu boleh dipindahkan dengan alasan, pertama secara hukum agama dia clear (ada alasannya) namanya ilad. Yang kedua, dari aspek sosial manfaat, contoh kena jalan itu manfaatnya untuk orang banyak. Itu dalam kasus dibolehkan," jelas Ketua MUI Kota Tangerang itu.

Namun, kata dia, terkait dengan makam Ki Buyut Jenggot, dirinya masih membutuhkan waktu untuk mempelajari hal tersebut. Bahkan, saat ini, pihaknya telah meminta oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tangerang untuk memberikan pertimbangan.

"Kaitan Ki Buyut Jenggot karena kita tidak paham, kita belum jelajah, kita belum bisa kasih komentar apa-apa. Dan sudah ada surat dari Budpar juga minta pertimbangan dari MUI. Nanti kita lihat seperti apa. Tapi kita memang tidak mau terjebak dengan situasi kita jangan sampai juga dianggap MUI pro dengan pengembang, kemudian juga nanti kita dianggap tidak jeli pro dengan masyarakat, sampai hari ini, situasi hari ini banyak juga umat gamang," paparnya.

Diketahui, makam Ki Buyut Jenggot akan dipindahkan oleh pengembang di Kota Tangerang untuk proyek perumahan. Namun warga sekitar menolak adanya relokasi makam tersebut. Hal itu lantaran makam Ki Buyut Jenggot memiliki nilai kearifan lokal oleh masyarakat. "Saya juga baru tau ada makam ini baru, tiba-tiba ini kan perlu ditelusuri ini oleh ahlinya. Bukan tim peneliti BPCB, itukan tinjauannya dari situs dia tidak bicara agama. Situs itu apakah cuma yang dilindungi oleh negara, nah itu situs beda lagi. Itu tidak ada urusan apakah ini makam orang soleh orang terhormat dia tidak ada urusan itu kalo cagar budaya," katanya.

Ia menambahkan, aspek sosial juga perlu dipertimbangkan. Namun, kata dia, banyak juga makam para orang-orang saleh maupun terhormat pada masanya, tetapi tidak dijadikan cagar budaya. "Dia kan ada aturannya 50 tahun dan seterusnya, kemudian ini ada imbas sosialnya kaya apa begitu kalo cagar budaya. Banyak juga makam-makam orang soleh, orang terhormat pada masanya dan dihormati masyarakat hari ini ketika sudah wafat itu tidak dicagar budayakan. Tetapi itu clear clear saja," pungkasnya. ● pp